

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana pengaruh Kampung Siaga Bencana dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Virus ini ditetapkan menjadi bencana non alam oleh pemerintah pada tanggal 13 April 2020. Hal ini ditegaskan melalui respon pemerintah pusat dengan adanya Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional. Dengan adanya keputusan ini setiap kepala daerah mempunyai kebijakan yang sah untuk mempersiapkan daerahnya menghadapi pandemi dan membuat kebijakan sebagaimana dicantumkan pada pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah kabupaten/kota dalam program penanggulangan bencana.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Sosial yang diatur dalam mitigasi bencana Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana. Mitigasi bencana melalui Kampung Siaga oleh Permensos No.128 ini menjelaskan Kampung Siaga Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang diorganisir oleh masyarakat, meliputi pengorganisir,

pelaksanaan dan pengawasan melalui pemanfaatan manusia dan sumber daya di daerah tersebut. Mitigasi melalui pengorganisasian masyarakat ini pula yang disebut sebagai Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas dengan meningkatkan peran komunitas di tingkatan akar rumput yang lebih memahami situasi daerahnya (Habibullah, 2013).

Selain Kampung Siaga Bencana, sebenarnya telah banyak usaha desa untuk mitigasi penyebaran Covid-19 seperti membuat pos jaga disetiap akses desa, membuat relawan desa, hingga pembatasan sosial berskala kecil atau *mini lockdown*. Namun kebijakan *mini lockdown* sendiri belum efektif untuk menekan laju penyebaran virus karena *mini lockdown* memerlukan pemetaan, pembatasan, bantuan ekonomi, juga *tracing* dan *testing* sehingga tidak asal melakukan *lockdown* yang hanya membatasi gerak sehingga *lockdown* RT/RW secara keseluruhan sama saja dengan *lockdown* daerah (Gloria, 2020).

Tidak hanya inisiatif daerah, Februari 2021 kemarin pemerintah pusat melalui evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan di pulau Jawa dan Bali karena dirasa tidak efektif maka melakukan PPKM skala desa atau kelurahan yang disebut PPKM Mikro (Riska, 2021). Kebijakan ini menunjukkan betapa pentingnya keikutsertaan desa dalam menanggapi covid. Namun jauh sebelum adanya PPKM mikro yang di gagas pemerintah pusat pemerintah daerah juga sudah menggagas Kampung Siaga Covid.

Disinilah peneliti menaruh perhatian bahwa sebelum pemerintah pusat menaruh harapan adanya partisipasi desa pada program yang akan datang, maka perlu melihat

partisipasi desa terhadap program serupa yang dijalankan sebelumnya, agar terlihat keseriusan pemerintah dan masyarakat yang akan berkolaborasi dalam kebijakan ini tidak hanya berganti-ganti kebijakan yang arahnya sama. Apalagi Kampung Siaga Covid-19 pada 11 Juni 2020 di Jawa Tengah sudah berjumlah 1.915 sehingga perlu menaruh perhatian khusus pada program mitigasi non-struktural ini seperti Kampung Siaga Covid-19 di Desa Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah yang menjadi studi kasus ini.

Tabel 1

Data Persebaran Covid-19 di Kabupaten Klaten 24 April 2020

No	Nama Daerah	Orang Dalam Pengawasan	Pasien Dalam Pengawasan	Orang Tanpa Gejala	Positif
1	Kemalang	3	-	-	-
2	Tulung	5	-	-	-
3	Jatinom	5	-	-	-
4	Wedi	11	-	-	-
5	Ngawen	8	2	-	-
6	Karangnongko	6	1	-	-
7	Klaten Utara	5	1	1	-
8	Kebon Arum	3	-	-	-
9	Manisrenggo	1	-	1	-
10	Klaten Selatan	10	1	-	-
11	Jogonalan	6	2	-	-
12	Prambanan	16	-	-	-
13	Gantiwarno	6	-	-	-
14	Polonharjo	2	-	3	-
15	Delanggu	4	-	4	-
16	Wonosari	15	1	2	3
17	Karanganom	9	1	9	1

18	Juwiring	1	2	10	3
19	Ceper	4	-	4	-
20	Pedan	4	-	-	-
21	Klaten Tengah	4	-	1	-
22	Kalikotes	9	1	-	-
23	Karangdowo	12	-	-	-
24	Trucuk	16	-	-	-
25	Cawas	10	-	-	-
26	Bayat	6	-	-	-

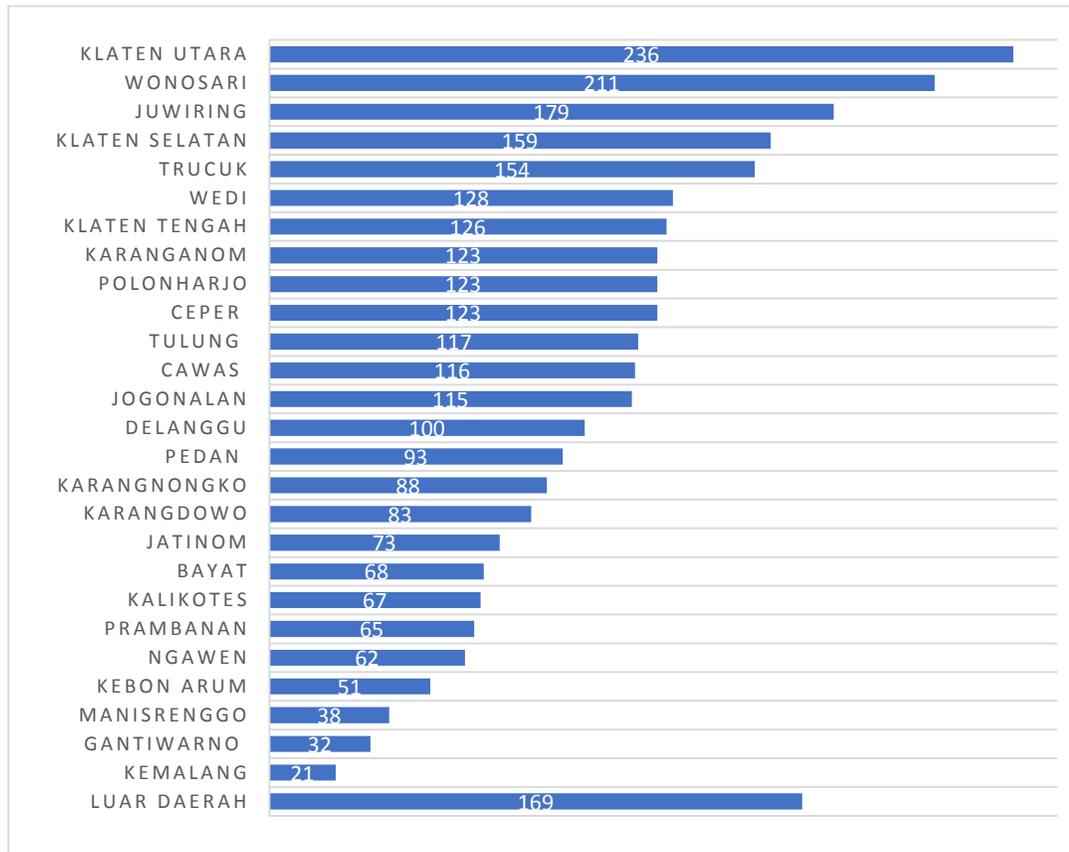
Sumber : Website Resmi Pemkab Klaten (Klatenkab.go.id)

Tabel diatas menunjukkan penyebaran Covid-19 di Klaten pada bulan April yang masih relatif rendah. Dari 26 kecamatan tersebut, Kecamatan Klaten Tengah memiliki nol kasus positif. Ini artinya pendirian Kampung Siaga Covid-19 di Desa Jomboran sudah tepat berdiri sebelum adanya penyebaran di desa tersebut.

Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas di Klaten direalisasikan dengan mendirikan Kampung Siaga Covid-19 di Desa Jomboran, pada 13 April 2020 (Victor Mahrizal, 2020). Alasan berdirinya Kampung Siaga Covid-19 di desa ini karena masyarakat Jomboran telah menyiapkan SOP penanggulangan bencana seperti posko jaga 24 jam, relawan desa, pemberlakuan prosedur bagi masyarakat pendatang, ruang isolasi, jaringan pengaman sosial swadaya, edukasi wajib masker dan giat cuci tangan (ibid). Alasan ini juga yang membuat desa ini menjadi desa percontohan bagi desa lain di Klaten. Sehingga dengan program yang tepat dan masyarakat yang partisipatif diharapkan bisa meminimalisir angka penyebaran Covid-19 di Desa Jomboran Kecamatan Klaten Tengah. Namun data penyebaran yang didapatkan peneliti menjelaskan bahwa terjadi peningkatan penularan hingga awal tahun 2021.

Grafik 1

Jumlah Pasien Terkonfirmasi Berdasarkan Kecamatan



Sumber : Website Resmi Pemkab Klaten (Klatenkab.go.id)

Berjalannya penanganan pandemi dari tahun 2020 hingga tahun 2021 ini telah membawa peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi di Klaten. Menurut data Pemerintah Kabupaten Klaten 11 Januari 2021 terdapat 313 suspek, 551 kontak erat, 260 kasus terkonfirmasi, 2541 total kesembuhan, 119 kasus konfirmasi meninggal, dan 81 orang meninggal belum terkonfirmasi (awasicorona.klatenkab.go.id). Peningkatan jumlah ini terjadi dari rentan data April 2020 hingga Januari 2021. Bahkan jumlah

kasus di Kecamatan Klaten Tengah sendiri sudah mencapai 178 orang, sehingga patut untuk dipertanyakan bagaimana penanganan pandemi di daerah terutama pada program Kampung Siaga Covid-19 yang menjadi garda terdepan penanganan pandemi di tingkat desa.

Inilah yang membawa peneliti tertarik untuk melihat fenomena yang terjadi di Kabupaten Klaten dengan studi kasus di Desa Jomboran yang memiliki Kampung Siaga Bencana. Atas dasar penyebaran Covid-19 di Klaten dan eksistensi kebijakan Kampung Siaga Bencana, peneliti akan melihat sejauh mana efektivitas program Kampung Siaga Covid-19 yang telah berdiri di Desa Jomboran untuk menghadapi Covid-19 tersebut. Bawa siaga ini sangat penting untuk mengedukasi masyarakat seputar perkembangan bencana dan menuntut masyarakat untuk mandiri dan sama-sama bergotong royong dalam menghadapi bencana, sehingga melalui partisipasi masyarakat yang sudah mandiri maka kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mendatang seputar Covid-19 bisa dijalankan di masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menemukan masalah bahwa berdirinya Kampung Siaga Covid-19 di Desa Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah pada April 2020 masih menunjukkan peningkatan kasus Covid-19 pada Januari 2021 dan menduduki posisi ke tujuh kasus terkonfirmasi positif di Klaten. Padahal program ini adalah instrument mitigasi bencana yang penting karena membutuhkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini akan melihat

bagaimana efektivitas dari program Kampung Siaga Covid-19 Desa Jomboran Kacamatan Klaten Tengah sebagai mitigasi bencana berbasis komunitas ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program Kampung Siaga COVID-19 di Desa Jomboran Kabupaten Klaten Tengah dalam memitigasi bencana pandemi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan mitigasi bencana berbasis komunitas Kampung Siaga Bencana.
2. Mengetahui keberhasilan dari kebijakan Kampung Siaga Bencana dalam .mitigasi COVID-19.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung kepada desa Jomboran untuk melihat sejauh mana keberhasilan program KSB yang mereka bangun untuk mitigasi pandemi.
2. Penelitian diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan tentang strategi pembuatan kebijakan KSB yang efektif dan tepat tujuan.
3. Menjadi rujukan tentang penanganan pandemi di masyarakat

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk mengetahui penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan agar penelitian yang dilakukan peneliti ini bisa diterima secara original serta terhindar dari persepsi plagiat. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

Habibullah (2013) dalam penelitiannya tentang “Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas: Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana” memaparkan pentingnya mendirikan Kampung Siaga Bencana untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat, membentuk jejaring dan memperkuat interaksi sosial, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, mengoptimalkan potensi dan sumber daya. Kemudian dalam penelitian ini juga dijelaskan pembentukan KSB merupakan usulan masyarakat di daerah rawan bencana yang ditetapkan Bupati/Walikota, inilah yang juga menjadi tinjauan penulis mendalami KSB Desa Jomboran faktanya diresmikan oleh Kapolres Klaten.

Belanawane S. (2015) dalam jurnal “Kampung Siaga Bencana Sebagai Instrumen Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Di Indonesia: Politik Pembangunan dan Partisipasi Dalam Diskursus Pembangunan Kebencanaan”. Jurnal tersebut menjelaskan secara konseptual, bencana dan pembangunan dapat berada dalam satu ruangan yang sama jika kita dapat menerima premis bahwa terdapat interdependensi yang rekat antara risiko dan pembangunan. Belanawane menjelaskan bahwa terdapat resiko kelaparan atau krisis pangan dan kemiskinan bukan karena gagal

panen, ataupun krisis jangka pendek, tapi karena struktur sosial yang mencegah mereka mendapatkan akses kepada ketersediaan pangan dan akses publik akhirnya menyebabkan bencana. Fenomena ini terjadi ketika dialektika masyarakat dan kebijakan tidak difasilitasi dengan baik akhirnya harus ada harga yang dibayar karena pembangunan. Maka dari itu jurnal ini menekankan pada penguatan partisipasi masyarakat dan pembangunan yang partisipatoris pada Kampung Siaga Bencana.

Nurtiana Noza, Yudhanto Satyagraha, Handrisal, (2017) dalam jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa Tangguh Bencana di Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan” menjelaskan tiga hal penting dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana dan Kampung Siaga Bencana yaitu menyuarakan kepentingan kelompok rentan yang terdampak langsung oleh bencana, perlu adanya keterwakilan semua unsur masyarakat dalam kepengurusan, dan *stake holder* memiliki tim yang kompak, kreatif, efektif, dan dapat dipercaya.

Dian Tamitiadini, Wayan & Isma (2019) menulis tentang “Inovasi Model Mitigasi Bencana Non-Struktural Berbasis Komunikasi, Informasi, Koordinasi dan Kerjasama” Penelitian ini mengusulkan bagaimana ilmu komunikasi diterapkan pada Mitigasi Bencana mengantisipasi letusan Gunung Agung , terutama koordinasi bencana atau dalam penelitian ini disebut sebagai “komunikasi bencana”. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa komunikasi partisipatif melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Komunikasi ini pula berdampak pada keberhasilan program penanggulangan bencana karena seluruh proses kegiatan

dilakukan masyarakat dan mengacu pada tujuan dan ketentuan dasar pelaksanaan program BNPB.

Muzakir Zinal, Marwan, Muksin & Yanis (2020) menulis jurnal berjudul “Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas Melalui Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pidie Jaya Nanggroe Aceh Darusalam” memaparkan tahapan pembentukan Destana di Kabupaten Pidie yaitu *pertama*, sosialisasi mitigasi bencana, yang dilakukan dengan edukasi dampak bencana gempa bumi di aceh yang juga dilakukan kepada pelajar. *Kedua*, pembuatan peta jalur evakuasi dan pemasangan papan informasi jalur evakuasi. *Ketiga*, pembentukan tim sigap bencana atau Tim Pengurangan Resiko Bencana (PRB). *Keempat*, melakukan survey tingkat pengetahuan kebencanaan masyarakat setelah berdiringa Desa Tangguh Bencana Gempa Bumi yang telah memahami tentang pengetahuan bencana alam, sebab gempa bumi, tindakan ketika ada gempa bumi.

Jurnal berjudul “Analisis Pengorganisasian dalam Penanggulangan Bencana Melalui Kelurahan Siaga Bencana di Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang” yang ditulis oleh Rosa Pevitanda & Dyah Hariani (2018). Menggunakan teori Ernest Dale tentang pengorganisasian, *Pertama*, Perincian pekerjaan, yang mengharuskan adanya pemahaman satu tujuan bersama tentang arah gerak *Kedua*, pembagian pekerjaan, dalam pembagian pekerjaan harus disesuaikan dengan kompetensi sumber daya manusia yang ada, arah gerak setiap tugas secara jelas, terutama keikutsertaan perempuan. *Ketiga*, departementalisasi, yang menekankan

kepada kerjasama antar lembaga. *Keempat*, koordinasi pekerjaan, bahwa setiap program harus dilakukan koordinasi yang baik dan informative kepada internal desa dan eksternal di desa. *Kelima*, monitoring dan reorganisasi.

Memiliki tahapan pembentukan yang serupa seperti jurnal diatas, Putra & Diatmika (2019) menulis jurnal berjudul “Rintisan Desa Tangguh Bencana (Destana) Di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng”. Tahapan yang digunakan menggunakan pendekatan pemberdayaan partisipasi dari BPBD Kabupaten Buleleng untuk Desa Sigit yaitu pengkajian resiko bencana dengan memetakan peta ancaman, peta kerentanan, peta kapasitas sehingga bisa dilihat resiko bencana yang ada kemudian melakukan pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) untuk bencana tanah longsor, banjir, dan gempa.

Dalam menciptakan iklim mitigasi yang baik, Kusumaratih & Satlita (2015) menulis jurnal tentang “Manajemen Desa Tangguh Bencana di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Di desa Poncosari”, manajemen desa meliputi empat tahap yaitu *Pertama*, tahap perencanaan, yaitu menganalisa ancaman, mendata kapasitas desa, dan menyusun perencanaan pengurangan resiko bencana. *Kedua*, tahap pengorganisasian, dimulai dengan pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), membentuk relawan, dan membangun jaringan komunikasi FPRB. *Ketiga*, tahap pengarahan, disini ada keterlibatan lembaga yang fokus dalam kebencanaan termasuk BPBD, PMI, serta MDMC untuk megarahkan tentang penanggulangan kebencanaan. *Terakhir*, tahap

pengawasan, dilakukan oleh BPBD beserta fungsi pengawasan, kemudian melaporkan hasil pengawasan berbentuk laporan pertanggungjawaban tahunan.

Pada pelaksanaan program desa, Ainun Najib & Hayatul Khairul Rahmat (2021) menulis hasil penelitian tentang “Analisis Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Desa Buluh Cina, Siak Hulu, Kampar, Riau”. Penelitian ini menekankan pentingnya masyarakat sebagai kelompok paling berpengaruh demi efektivitas tujuan program Desa Tangguh Bencana maka dari itu program yang dibuat, dijalankan, dan dipahami harus memiliki satu pandangan bersama. Dalam hal ini partisipasi warga dihimpun dalam satu forum yang terdiri dari masyarakat golongan tua, pemuda, dan organisasi perempuan yang akan dibina oleh BPBD. Sehingga akan berbanding antara pengetahuan masyarakat dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimanfaatkan secara baik. Hasilnya ialah program yang sudah direncanakan dapat berjalan seperti pembangunan bangunan tinggi untuk titik kumpul banjir, peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat soal banjir, membuat jalur evakuasi, dan pertemuan rutin upaya mitigasi.

Suprayoga Hadi (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana” menjelaskan pentingnya penanganan Covid-19 berbasis komunitas. Bahwa untuk dapat meningkatkan kinerja penanganan pandemik Covid-19, diperlukan pengurangan risiko yang berbasis peran serta masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan karakteristik sebaran wabah pandemik yang transmisinya bersifat

person-to-person, atau sangat bersifat lokalitas, sehingga perlu dicegah dan dikurangi tingkat penyebarannya (*level of transmission*-nya) secara lokal dan hak warga negara untuk terlibat dalam perumusan kebijakan penanganan Covid-19.

Jurnal terkait penanggulangan Covid-19 berjudul “Mewujudkan Masyarakat Siaga Covid-19 di Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Melalui Kegiatan KKN Tematik” yang ditulis oleh Irfan Santosa & Ponoarjo (2021) meneliti tentang kepatuhan masyarakat terhadap Gerakan 3 M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak) melalui *soft program* seperti sosialisasi dan *hard program* pengadaan sarana dan prasarana serta penancangan Kampung Siaga Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terkait penanggulangan Covid-19 melalui wawancara yang dilakukan yang dibuktikan penurunan angka terpapar dan meninggal dunia.

Mohamad Amin, Vivi Novianti, & I Wayan Sumberartha et.al (2020) menulis jurnal “Pembentukan Satgas Siaga Covid-19 dan Implementasi Tupoksi Satgas Desa Mulyoagung Kabupaten Malang”. Jurnal ini menjelaskan terdapat modal pembentukan potensi pemberdayaan masyarakat melawan Covid-19 antara lain warga yang guyub, memiliki wadah forum pemuda, adanya komunitas yang bergerak pada kesehatan masyarakat, dan forum ibu-ibu PKK yang berada di ruang lingkup RW 12. Program yang dilakukan terdiri dari tiga tahap yaitu *pertama*, kegiatan perencanaan yang diawali diskusi perencanaan kemudian pembentukan Satgas Siaga Covid-19, *kedua*

tahap pelatihan dan penyusunan tupoksi, dan *ketiga* yaitu pendampingan sekaligus evaluasi program.

Selain itu, Mukhsa, Ida Usman, Abapihi et al., (2020) juga menulis jurnal yang berjudul “Penguatan Desa Siaga Covid-19”. Penelitian ini dilakukan di 27 desa di Sulawesi Tenggara untuk mengukur pengaruh penyuluhan Covid-19 terhadap pengetahuan masyarakat demi meminimalisir dampak pandemi. Menggunakan metode kuantitatif, narasumber didominasi oleh petani (19,66%), untuk jenjang pendidikan didominasi lulusan SMA/ sederajat (39,55%) kemudian dalam rentan umur didominasi 25 tahun kebawah (41,02%). Kemudian hasil yang didapatkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait Covid-19 sebelum adanya sosialisasi sebesar 62,29% dan setelah sosialisasi dilakukan oleh mahasiswa KKN menjadi 93,33%.

Alfin Riska Nihawa (2020) menulis skripsi berjudul “Penguatan Kelambagaan Pemuda Dalam Mengurangi Penyebaran Pandemi Covid-19 di Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”. Menggunakan metode kualitatif, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Asset Based Community Development* atau pendekatan pemberdayaan berbasis asset. Alfian melihat strategi yang digunakan di desa ini adalah penguatan kelembagaan pemuda. Pemuda desa terlihat sangat partisipatif dengan membuat jaringan koordinasi di grup *Whatsapp*, mendirikan posko siaga Covid-19, penyemprotan disinfektan, dan mendirikan warung gotong royong. Berdasarkan teori yang ada, masyarakat desa pasca pengorganisasian oleh pemuda lebih menyadari potensi asset desa baik manusia, fisik maupun organisasi yang mereka

miliki sehingga mendapatkan inovasi untuk diimplementasikan mengurangi penyebaran Covid-19.

Nur Aini, Irma Fitriana & Laode Machdani (2018) membahas “Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana di Desa Sirnobojo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2017”. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas milik Lubis dan Huseini sebagai indikator melihat pola pelaksanaan program DTB yaitu *Pertama*, pendekatan sumber, pendekatan sumber merupakan pendekatan sumber yang terdiri dari sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber sarana dan prasarana. *Kedua*, pendekatan proses, pendekatan ini mengacu Rencana Penanggulangan Bencana dan kegiatan yang dilakukan selama proses penanggulangan berlangsung. *Ketiga*, pendekatan sasaran, pendekatan ini melihat tujuan dari kausalitas lingkungan, ekonomi, dan sosial secara keseluruhan. Melalui metode kualitatif, ketiga indikator ini dinilai belum efektif karena minimnya jumlah relawan, dana, sarana dan prasarana, kemudian dengan minimnya jumlah SDM tersebut juga belum siap menghadapi bencana.

Henny Hidayanti (2017) menulis jurnal berjudul “Efektivitas Desa Siaga Aktif di Desa Sumber Pinang, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo”. Desa Siaga ini berfokus kepada pembinaan dan manajemen desa tentang kesehatan masyarakat. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai unsur elemen untuk melihat kesesuaian rancangan dan hasil yang dijalankan. Wawancara masyarakat seperti Kepala Desa, Tim Petugas Kesehatan Puskesmas, Bidan Wilayah, dan Kepala

Saksi. Hasil dari wawancara yang telah diolah menunjukkan bahwa efektivitas desa ini masih kurang karena apa yang diharapkan tidak bisa berjalan sesuai tujuan dikarenakan sumber anggaran masih kurang, keterbatasan tenaga penyuluh, kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah dan pemerintah desa sehingga jaringan yang dibangun berdampak pada respon pemerintah tingkat bawah belum terorganisir, dan kualifikasi tenaga kesehatan yang kurang untuk menyadarkan masyarakat melalui sosialisasi.

Maulana Mufis, Dyah Hariani & Titik Djumiarti (2015) dalam jurnal berjudul “Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Siaga Bencana di Kota Semarang” menggunakan teori Duncan sebagai ukuran efektivitas yang mempunyai tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, kemampuan integrasi, kemampuan adaptasi. Hasil penilaian menunjukkan *pertama*, bahwa belum adanya keterikatan waktu pencapaian, pengurus bahkan belum mempunyai target yang bisa diukur, sehingga peneliti belum bisa mendapatkan hasil dari pencapaian tujuan. *Kedua*, belum adanya peran swasta dan kerjasama serius untuk penanggulangan bencana. *Ketiga*, dalam beradaptasi dengan bencana yang akan ditangani, baru sebatas penentuan jalur evakuasi, pembentukan posko bencana, dapur umum, dan rencana penggunaan sarana dan prasarana. Masalah yang ditemui oleh peneliti bahwa kurangnya rencana membentuk partisipasi dan kebijakan yang partisipatif sehingga masyarakat yang menjadi penggerak program belum mempunyai kapabilitas dan kesamaan tujuan.

Penelitian tentang efektivitas program Desa Tangguh Bencana lainnya ditulis oleh Desi Setyawati & Pambudi (2018) berjudul “Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo, Cangkringan, Sleman, DIY”. Tolak ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Budiani dengan empat indikator yang diteliti menggunakan metode kualitatif yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program yang dinilai berjalan dengan baik dan sudah dilaksanakan. Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Argomulyo sudah cukup efektif. Ketepatan sasaran program Destana di Desa Argomulyo telah mencapai sasarannya yaitu masyarakat, pemerintah dan komunitas yang lebih sadar terhadap pentingnya penanggulangan bencana. Sosialisasi program Destana di Desa Argomulyo yang dilakukan oleh BPBD Sleman.

Tabel 2

Ringkasan Tinjauan Pustaka

No	Tema	Penulis	Kesimpulan
1.	Kampung Siaga Bencana	Alfin Riska Nihawa dan Arnidha Kusumaratih (2015) Habibullah (2013) Irfan Santosa, Ponoharjo, Mursyidah (2021) Mohamad Amin, Vivi Novianti, I Wayan Sumberartha, Bagus Priambodo, Ahya Zhilalikbar Amin, Yayuk Prihatnawat (2020) Mukhsar, Ida Usman, Bahridin Abapihi, Asrul Sani, Baharuddin (2020) Muzakir Zinal, Marwan, Muksin dan Yanis (2020) Nurtiana, Yudhanto & Handrisal (2017) Rosa Pevitanda dan Dyah Hariani (2018)	Kampung Siaga Bencana didirikan atas usulan masyarakat karena mengerti bahwa kebijakan pemerintah harus partisipatif agar tidak terjadi masalah baru atas kebijakan yang agar pemahaman mitigasi bencana merata. Ada beberapa tahapan pembentukan Kampung Siaga Bencana yang ada pada beberapa jurnal penelitian ini yang memiliki kesamaan proses yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan perencanaan, yang terdiri dari penfkgkajian risiko bencana, sosialisasi mitigasi bencana, perincian dan pembagian pekerjaan, serta penetapan program kerja. 2. Pembentukan tim sigap bencana atau Forum Pengurangan Risiko Bencana. 3. Tahap pengorganisasian. Melalui upaya penyuluhan non fisik dan fisik atau <i>Asset Based Community Development</i> dengan memanfaatkan potensi desa sarana dan prasarana. 4. Tahap pengawasan, dimana lembaga yang terlibat dalam kebijakan akan melakukan evaluasi, monitoring.

2.	Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas	Muhammad Belanawane.S (2015) Ainun Najib dan Hayatul Rahmat (2021) Suprayoga Hadi (2020) Dian Tamitiadini, Wayan dan Isma (2019)	Mitigasi bencana berbasis komunitas adalah pemberdayaan masyarakat lokal untuk siap menghadapi bencana di daerah rawan bencana agar bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan. Bahwa untuk dapat meningkatkan kinerja penanganan pandemik Covid-19, diperlukan pengurangan risiko yang berbasis peran serta masyarakat yang transmisinya bersifat <i>person-to-person</i> , atau sangat bersifat lokalitas. Itu artinya sejak tahap perencanaan hingga evaluasi harus mengikutsertakan masyarakat, hal ini pula yang mempengaruhi keberhasilan program mitigasi bencana
3.	Efektivitas kampung siaga bencana	Nur Aini, Irma Fitriana dan Laode Machdani (2018) Henny Hidayanti (2017) Maulana Mufis, Dyah Hariani & Titik Djumiarti (2015) Desi Setyawati & Argo Pambudi (2018)	Bahwa untuk mengukur efektivitas program kampung siaga bencana ada beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan yang diterapkan di keempat penelitian yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber, yaitu penilaian akan kualitas sumber daya manusia, kapasitas sarana dan prasarana, dana oleh pemerintah serta partisipasi dan regulasi yang dijalankan 2. Proses, dengan menilai rancangan penanggulangan bencana dan kegiatan yang dilakukan termasuk sosialisasi 3. Sasaran, memantau tujuan dari program yang dilihat sebelumnya.

Sumber : Diolah oleh peneliti, (2021)

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Teori Efektivitas

Dalam hal ini efektivitas merupakan metode bagaimana peneliti ingin melihat capaian dari kebijakan itu sendiri. Peneliti sadar ditengah panemi seperti ini pemerintah sangat perlu merumuskan kebijakan yang bisa menekan angka

Covid-19 dan edukasi kepada masyarakat maka dari itu perlu menganalisis sejauh mana efektivitas kebijakan pemerintah itu sendiri. Menurut Lubis dan Husein dalam (Aini et al., 2018) bahwa efektivitas sangat penting dalam karena mampu memberikan gambaran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain mengatakan bahwa efektivitas bertujuan untuk menilai aspek kinerja pencapaian (akibat) yang berfokus pada tujuan pencapaian kebijakan (sebab) (Oberthür & Groen, 2015).

1.6.2. Pendekatan Efektivitas

Efektivitas bisa diukur apabila kita tahu bagaimana siklus kebijakan itu sendiri dan pendekatan yang harus dilakukan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas (Ding, 2014) yaitu :

1. Pendekatan Sasaran (*goal approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian nilai kegagalan dan keberhasilan relatif dari membandingkan *output* dengan *input* organisasi.

2. Pendekatan Sistem (*system resource approach*)

Pendekatan sistem berpandangan bahwa organisasi dipandang sebagai suatu sistem. Sistem yang terdiri dari beberapa bagian yang bergerak dan saling berkorelasi dan bergantung satu sama lain sebagai keseluruhan untuk mencapai tujuan. Pendekatan sistem menjelaskan bahwa organisasi

memperoleh masukan (*input*), melakukan proses transformasi, dan menghasilkan keluaran (*output*).

Menurut pendekatan ini, menetapkan efektivitas sebuah organisasi atas dasar hasil pencapaian *output* saja belum sempurna, sehingga dalam menilai efektivitas organisasi dimulai dari kemampuannya untuk mendapatkan *input*, memproses *input* tersebut, menghasilkan *output*, dan mempertahankan stabilitas keseimbangan. Pendekatan ini juga didasarkan pada teori hubungan lembaga terhadap lingkungannya. Secara mendasar sistem ini adalah sistem dari dalam organisasi dan diluar organisasi itu sendiri tentang sejauh mana hubungan dengan lingkungan untuk bersama mencapai tujuan.

3. Pendekatan Proses (*internal process approach*)

Pada organisasi yang efektif, proses di internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan terkoordinasi. Pendekatan proses tidak menjadikan lingkungan sebagai perhatian melainkan kegiatan dan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi serta stabilitas internal tersebut.

1.6.3. Tolak Ukur Efektivitas

Tolak ukur disini berfungsi untuk mengetahui secara mendalam melalui metode pendekatan yang digunakan kemudian mengetahui sudut pandang penilaian efektivitas itu sendiri yang perlu dipenuhi. Pada dasarnya ada lima

tolak ukur dalam hal keefektifan implementasi suatu kebijakan (Nugroho, 2017), yaitu:

- a. Tepat Kebijakan. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Selain itu tepat kebijakan juga persoalan tentang apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Kemudian apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.
- b. Tepat Pelaksanaan. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat.
- c. Tepat Target. Ketepatan disini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, target tersebut dalam kondisi siap

untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

- d. Tepat Lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan; interpretive institution yang berkenaan dengan interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan; individuals, yakni individu individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.
- e. Tepat Proses. Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu : 1) *Policy acceptance*. Di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. 2) *Policy adoption*. Di sini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima

kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. 3) *Strategic readiness*. Di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.

- f. Selain tolak ukur diatas Oberthur dan Groen menggunakan model efektivitas yang mengukur kebijakan dari proses *Input* hingga *Output* sehingga kelebihan dari indikator yang dirumuskan adalah mampu mengukur efektivitas system secara keseluruhan. Secara sistematis, terdapat siklus korelasi antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai, dimana indikator efektivitas mencakup 3 hal (Oberthür & Groen, 2015), yaitu:

1. Masukan (Input)

Evaluasi input bertujuan untuk menilai seberapa siapnya perumusan kebijakan. Sumber daya menjadi tolak ukur tentang kualitas manusia, sarana dan prasarana, dan sumber pembiayaan. Kemudian dari aspek strategi dapat dinilai melalui prosedur, tepat target dan tepat kebijakan.

2. Proses (Process)

Proses terkait dengan tata kelola apakah program dilaksanakan sesuai perencanaan. Kemudian melihat keterlibatan para actor kebijakan, komunikasi, kesesuaian posisi dalam konstelasi kekuasaan dan kepentingan. Efektivitas proses mengamati keberlangsungan program dan melihat adaptasi strategi untuk mencapai tujuan yang sama.

3. Hasil (outcome)

Pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan pada tahap ini kemudian dinilai keberhasilan kebijakan tersebut. Apakah program tersebut sudah sesuai dengan sasaran, dampaknya bagi masyarakat, kemudian dengan hasil yang ada apakah akan dimodifikasi sesuai perubahan lapangan dan kebijakan yang berlaku sehingga adanya system yang terbentuk dari hasil yang dicapai.

Ketiga siklus tersebut menurut pendekatan sistem (*system resource approach*) oleh Diminus Ding bahwa selurusilalahih elemen harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, pemanfaatan sumber daya, hingga hasil yang akan ditujukan harus mempunyai satu frekuensi antara internal organisasi dan eksternal sehinga kita dapat melakukan tolak ukur landasan efektivitas. *Input* dalam pendekatan sistem juga bukan cita-cita atau tujuan kebijakan itu sendiri secara sederhana yang menjadi tolak ukur, melainkan bagaimana suatu kebijakan dibentuk memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM), keadaan sosial, sarana dan prasarana, serta teknologi sehingga dapat diubah melalui proses yang partisipatif mencapai *output* (Silalahi, 2017).

1.6.4. Mitigasi Bencana

Mitigasi menurut King (2007) dalam (Behavaola Kusumasari, 2011) adalah tindakan yang dilakukan sebelum bencana terjadi dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan dampak bencana. Senada dengan King, *Federal*

Emergency Management Agency (2006) dalam (Behavaola Kusumasari, 2011) mendefinisikan mitigasi sebagai kegiatan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kondisi darurat yang mengakibatkan dampak kerusakan. Coppola (2007) dalam (Behavaola Kusumasari, 2011) mitigasi merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana melalui pengurangan kemungkinan dan komponen konsekuensi risiko bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran atau peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Mitigasi bencana bertujuan mengurangi dampak yang akan ditimbulkan akibat suatu bencana melalui analisis pra kebencanaan yang terencana dan komperhensif agar berjalan semestinya.

Coppola mengkategorikan mitigasi menjadi dua yaitu struktural dan non struktural. Mitigas struktural adalah upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan melalui pembangunan fisik. Upaya mitigasi struktural diantaranya adalah ketahanan konstruksi, struktur bangunan, relokasi, dan sistem pendeteksi. Sedangkan mitigasi non struktural adalah upaya pengurangan risiko bencana melalui perilaku manusia. Kegiatan atau contoh upaya mitigasi non struktural adalah penyusunan regulasi, kesadaran masyarakat, dan program pendidikan.

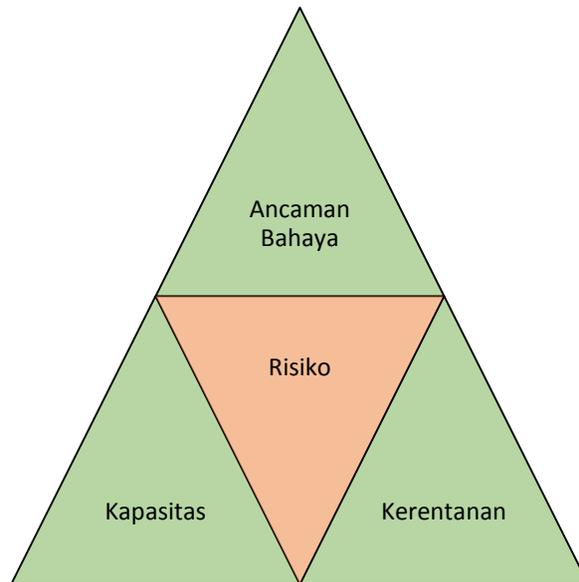
Oleh karena itu, mitigasi bencana dilakukan di Kawasan rawan bencana sebagai satu titik utama dari manajemen kebencanaan. Kegiatan mitigasi bencana diantaranya (Sucipto, 2019):

1. Pengenalan serta pemantauan resiko bencana
2. Penerapan upaya pengaturan penanggulangan bencana, upaya fisik, dan non fisik
3. Identifikasi terhadap sumber ancaman bencana
4. Pemantauan pengelolaan sumber daya alam
5. Pengawasan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup

Langkah awal yang diperlukan dalam melakukan mitigasi bencana adalah melakukan kajian resiko. Hal ini diperlukan agar mampu menganalisis program yang tepat untuk menangani resiko kebencanaan tersebut. Dalam menghitung resiko bencana di suatu daerah harus menganalisa tingkat bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) suatu wilayah (Mudzakir, 2018).

Gambar 1

Konsep Pengurangan risiko bencana



Sumber : Diolah dari Mudzakir (2018)

Bahaya (hazard) merupakan suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa atau kehilangan harta benda. Tidak semua bahaya bisa menimbulkan bencana jika hanya potensi kecuali telah menimbulkan korban dan kerugian sehingga menjadi bencana. Oleh karena itu, analisis potensi bahaya menggunakan tolak ukur di atas sangat penting sebagai tindakan mitigasi bencana.

Program kampung siaga bencana merupakan salah satu instrumen mitigasi dan penanggulangan bencana dalam suatu wadah formal dari, oleh, dan untuk masyarakat yang berlandaskan pembagian urusan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kampung Siaga Bencana (KSB) Menurut Peraturan Menteri

Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang wilayahnya dijadikan untuk program penanggulangan bencana. Karena landasan KSB sendiri adalah pembagian urusan pemerintahan oleh karena itu KSB ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan dapat diusulkan pembentukannya oleh masyarakat.

Dalam menanggapi status kedaruratan Kesehatan masyarakat akibat pandemic Covid-19, maka diperlukan upaya penguatan kapasitas local dalam rangka kesiapsiagaan dan pencegahan serta menghindari potensi kejadian penyebaran Covid-19. Pemerintah mempertimbangkan perlunya pengurangan risiko penyebaran Covid-19 di tingkat lokal, dengan adanya penerapan Kampung Siaga Bencana maka program ini dinilai tepat sebagai pendekatan berbasis komunitas yang selanjutnya akan memperkuat ketahanan nasional sehingga menjadi landasan berdirinya Kampung Siaga Covid-19 di tanah air (Hadi, 2020).

1.6.5. Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas

Mitigasi bencana berbasis komunitas adalah upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam satu wilayah tertentu atau memiliki visi yang sama secara terorganisir sejak sebelum, saat dan sesudah bencana dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki semaksimal mungkin untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana (Hadi, 2020). Alasan mengapa pentingnya masyarakat dalam mitigasi bencana karena masyarakat yang akan berhadapan langsung dengan ancaman bencana,

sehingga dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat untuk mengurangi kerentanan dengan meningkatkan kemampuan diri menangani bencana (Ibid)

Terkait dengan mitigasi bencana berbasis komunitas, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana “bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana”, dimana peran serta tersebut mencakup “pengambilan keputusan, memberikan informasi, pengawasan, perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan program”, dan diantaranya terkait dengan “penyusunan rencana mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana”.

Selanjutnya, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 11 Tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana, yang menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem penanggulangan bencana, mulai dari tahap pra- bencana, tanggap darurat, pemulihan awal dan pasca-bencana, yang dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama, dan mengutamakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.

Beberapa kebijakan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini, diantaranya adalah melalui Keluarga Tanggap Bencana (KATANA), Desa Tangguh Bencana (Destana),

Kampung Siaga Bencana (KSB), Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), yang telah diimplementasikan di berbagai daerah, terutama daerah-daerah yang dikategorikan rawan dan pasca bencana (Hadi, 2020).

1.6.6. Kampung Siaga Bencana

Program kampung siaga bencana merupakan salah satu instrumen mitigasi dan penanggulangan bencana dalam suatu wadah formal dari, oleh, dan untuk masyarakat yang berlandaskan pembagian urusan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kampung Siaga Bencana (KSG) Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang wilayahnya dijadikan untuk program penanggulangan bencana. Karena landasan KSG sendiri adalah pembagian urusan pemerintahan oleh karena itu KSG ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan dapat diusulkan pembentukannya oleh masyarakat.

1.6.7. Tujuan Kampung Siaga Bencana

Dalam Permensos No. 128 Tahun 2011 dijelaskan secara gamblang tujuan dibentuknya KSG yaitu: *Pertama*, pembentukan KSB bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana. *Kedua*, memperkuat interaksi sosial masyarakat dengan membentuk jejaring kebencanaan. *Ketiga*, mengorganisir masyarakat agar terlatih siaga bencana. *Keempat*, adanya ketersinambungan kesiapsiagaan bencana berbasis

masyarakat. *Kelima*, mengoptimalkan potensi sumber daya untuk penanggulangan bencana.

Secara garis besar, masyarakat melalui serangkaian aktivitas program kampung siaga bencana diharapkan dapat memahami kondisi kebencanaan di wilayahnya, meminimalisir dampak, serta meningkatkan kapasitas untuk menghadapi bencana melalui sumber daya desa.

1.6.8. Syarat Berdirinya Kampung Siaga Bencana

Syarat berdirinya KSG dalam Permensos No. 128 Tahun 2011 menjelaskan bahwa daerah tersebut harus memiliki kerawanan terhadap jenis bencana tertentu. Kemudian masyarakat yang menjadi partisipan memiliki kesiapan dan peran aktif. Setelah itu ketika penetapan, daerah tersebut harus memiliki kelengkapan Gardu Sosial dan Lumbung Sosial.

Gardu sosial yang dimaksud dalam aturan permensos merupakan bangunan permanen yang menjadi sekretariat Kampung Siaga Bencana begitupun lumbung sosial yang menjadi tempat penyimpanan persediaan barang-barang guna mendukung penanggulangan bencana. Kedua hal tersebut merupakan kelengkapan untuk mendukung jalannya kampung siaga yang akan di manajemen oleh masyarakat.

1.6.9. Pembentukan Kampung Siaga Bencana

Menurut peraturan Permensos No.128 diatas, bahwa *pertama*, masyarakat sudah melakukan musyawarah untuk memilih keanggotaan KSB yang terdiri dari pengurus dan anggota berjumlah 30-50 orang yang bersifat sukarela, mendapat pelatihan penanggulangan oleh instansi terkait dan tim KSB adalah masyarakat bertempat tinggal di daerah tersebut. *Kedua*, tim tersebut mengusulkan penetapan KSB kepada Bupati/Walikota setelah rekomendasi oleh lurah atau camat setempat. *Ketiga*, setelah mendapat usulan tersebut Bupati/Walikota dapat menetapkan nama, lokasi, dan tim KSB.

1.7. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah definisi yang menjadi batasan penelitian yang dilakukan di lapangan, yang berisi masalah ataupun problem yang dijadikan pedoman dalam penelitian atau studi kasus di lapangan. Definisi konseptual digunakan untuk lebih memahami dan memudahkan dalam menjabarkan atau mengartikan dari teori-teori kedalam penelitian di lapangan. Maka, akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang memiliki kaitan erat dengan masalah yang akan diteliti.

1.7.1. Efektivitas

Efektivitas merupakan kesesuaian antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang didapatkan atas suatu kebijakan dengan memanfaatkan segala

kemampuan dan sumber daya (input) yang ada di lingkungan masyarakat agar bersama memperoleh suatu tujuan (output).

1.7.2. Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas

Mitigasi bencana berbasis komunitas adalah upaya non-struktural yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam satu wilayah tertentu atau memiliki visi yang sama secara terorganisir sejak sebelum, saat dan sesudah bencana dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki semaksimal mungkin untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana

1.7.3. Kampung Siaga Bencana

Merupakan salah satu instrumen mitigasi bencana dalam satu wadah formal dan satu wilayah rawan bencana yang menitikberatkan partisipasi dari, oleh, dan untuk masyarakat secara berkesinambungan yang bertujuan untuk melakukan penanaman edukasi kebencanaan, jejaring penanggulangan bencana dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.

1.8. Definisi Operasional

Penelitian tentang efektivitas kebijakan Kampung Siaga Covid-19 di Desa Jomboran pada tahun 2020 ini merujuk pada teori Oberthur dan Groen yang memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai indikator efektivitas kebijakan yaitu :

Tabel 3

Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator	Parameter
1	Masukan	a. Analisis Kebencanaan	1.) Prosedur pembentukan Kampung Siaga Covid-19 sesuai regulasi 2.) Sudah memetakan resiko kebencanaan
		b. Sumber Daya	1.) Memiliki relawan yang cukup dan memahami mitigasi Covid-19 2.) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kebijakan 3.) Mempunyai sumber pendanaan sesuai kebutuhan
		c. Perencanaan Strategi	1.) Mempunyai regulasi protokol kesehatan 2.) Adanya rencana alokasi dana pada program 3.) Perencanaan dirumuskan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dan partisipatif bersama masyarakat 4.) Adanya kerangka acuan kerja tentang target program, pembagian tanggung jawab, dan jadwal kegiatan
2	Proses	a. Pelaksanaan	1.) Adanya partisipasi warga dalam menjalankan program dan menerapkan protokol kesehatan 2.) Adanya kerjasama antara kelompok kepentingan Pemerintah Daerah dan

			<p>Pemerintah Desa sekitar jomboran</p> <p>3.) Terdapat penanganan dan bantuan bagi masyarakat yang terdampak dan kelompok rentan</p> <p>4.) Adanya edukasi perkembangan Covid-19 di masyarakat</p> <p>5.) Program yang direncanakan terlaksana dan mampu beradaptasi</p>
		b. Pengawasan dan Evaluasi	<p>1.) Terdapat aktivitas pengawasan secara berlaka dan evaluasi terhadap program Kampung Siaga Covid-19</p> <p>2.) Terdapat laporan hasil pengawasan dan evaluasi</p> <p>3.) Adanya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran</p> <p>4.) Adanya penindakan bagi pelanggaran protokol Kesehatan aturan Kampung Siaga Covid-19</p> <p>5.) Mempunyai pendataan masyarakat terdampak dan terkonfirmasi Covid-19</p>
3	Hasil	a. Dampak	<p>1.) Kesesuaian antara target yang di rencanakan dengan hasil yang didapatkan</p> <p>2.) Dapat mengurangi penyebaran Covid-19 di Desa Jomboran</p>

Sumber : Diolah oleh peneliti (2021)

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Paradigma yang akan peneliti gunakan adalah paradigma Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh menggunakan prosedur statistik maupun hitungan lainnya (Gunawan, 2013), oleh karena itu penelitian kualitatif biasa menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan memanfaatkan dokumen (Argueso et al., 2019). Dengan demikian penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada latar alamiah dimana peneliti adalah instrumen utama dalam menafsirkan fenomena yang yang tidak dapat dikuantifikasikan sehingga fenomena tersebut ditafsirkan secara naratif agar melihat gejala yang terjadi dalam perpektif keseluruhan (Albi dan Johan, 2018).

Jenis penelitian yang dipilih juga disajikan secara deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Soendari, 2012). Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Jomboran, Kecamatan Kelaten Tengah. Pemilihan lokasi dilatar belakangi karena desa ini merupakan desa percontohan Kampung Siaga COVID-19 di Kabupaten Klaten dan juga di inisiasi sebelum pandemi menyebar kedesa tersebut sehingga kebijakan KSB merupakan kebijakan yang dilaksanakan untuk memitigasi sebelum adanya bencana.

1.9.3. Unit Analisis Data

Unit analisis data adalah bagian yang diobservasikan, dicatat dan dianggap sebagai data seperti aktivitas individu, kelompok, benda, atau suatu latar belakang sosial sebagai subjek kemudian memisahkan menurut batas-batasnya dan mengidentifikasi untuk di analisis (Akbar, 2015). Unit analisis adalah bagian dari isi yang akan diteliti lebih lanjut yang kemudian disederhanakan. Maka unit analisis dalam penelitian ini adalah Bupati Klaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten, Pemerintah Desa Jomboran, relawan Kampung Siaga Covid-19 Desa Jomboran, dan masyarakat desa Jomboran.

1.9.4. Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer digunakan sebagai data terbaru yang akan didukung dan dibandingkan dengan data sekunder mengenai hasil penelitian yang sama.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Data primer diperoleh melalui wawancara narasumber yang memiliki keterkaitan permasalahan sesuai permasalahan yang diteliti. Dengan demikian untuk mendapatkan data tersebut peneliti akan melakukan wawancara langsung di lokasi penelitian.

Tabel 4

Data Primer Penelitian

No	Nama Data	Sumber	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Prosedur pembentukan Kampung Siaga Covid-19 di Desa Jomboran	Kapolres Klaten dan Kepala Desa Jomboran	<i>Input</i>	Wawancara
2	Pembekalan relawan desa dalam pencegahan dan penanganan Covid-19	Kepala BPBD Klaten	<i>Input</i>	Wawancara
2	Perencanaan program Kampung Siaga Covid-19 Desa Jomboran	Kepala Desa, Tim Kampung Siaga Covid-19	<i>Input</i>	Wawancara
3	Penerapan program Kampung Siaga Covid-19 Desa Jomboran	Kepala Desa, Tim Kampung Siaga Covid-19, dan masyarakat Desa Jomboran	<i>Process</i>	Wawancara

4	Pemahaman masyarakat tentang program Kampung Siaga Bencana	Masyarakat	<i>Process</i>	Wawancara
5	Pola pengawasan dan pembinaan atas kegiatan Kampung Siaga Covid-19 Desa Jomboran	Bupati Klaten	<i>Process</i>	Wawancara
6	Dampak Program Kampung Siaga Covid-19 Desa Jomboran	Kepala Desa, Tim Kampung Siaga Covid-19, dan masyarakat Desa Jomboran	<i>Output</i>	Wawancara

Sumber : Diolah dari definisi operasional penelitian

Berdasarkan tabel di atas bahwa narasumber yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah Bupati sebagai pihak yang mempunyai kewenangan pembentukan dan pengawasan, Kapolres Klaten dalam kasus ini menjadi pihak yang meresmikan Kampung Siaga Covid-19 Jomboran, BPBD sebagai penyelenggara penanggulangan bencana daerah, Kepala Desa, Tim Kampung Siaga dan masyarakat sebagai sasaran program. Pemilihan narasumber tersebut didasarkan peran narasumber dalam berjalannya program desa tangguh bencana. Sehingga data yang terkumpulkan adalah data yang berasal dari berbagai aktor kepentingan kebijakan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak memberikan informasi langsung kepada peneliti. Data sekunder yang digunakan akan menjadi pendukung landasan data primer yang bisa berupa literatur, atau

data penunjang hasil olahan data primer yang sesuai dengan topik penelitian. Dengan data sekunder ini peneliti akan mencari laporan alokasi anggaran Kampung Siaga Covid-19 kepada Pemerintah Desa Jomboran, dokumen perencanaan penanggulangan bencana, dan laporan hasil pengawasan evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten

1.9.5. Teknik Menentukan Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian empirik diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel. Dalam penelitian kualitatif sampel bukan lebih berfokus kepada kuantitas populasi melainkan merujuk kepada representasi terhadap fenomena sosial agar lebih mendalami dan mendapatkan informasi seluas-luasnya dengan keadaan yang ada sehingga dapat mendeskripsikan fenomena secara utuh (Nugrahaini, 2014).

Dalam penelitian kualitatif, penentuan yang sering digunakan adalah *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling* (Sugiyono, 2012). *Purposive Sampling* adalah cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa informasi yang kita butuhkan, sehingga penetapan informan yang benar-benar menguasai informasi serta dipercaya untuk menjadi sumber data.. Sedangkan *Snowball Sampling* adalah pengambilan sampel yang awalnya narasumber jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Ibid).

Teknik Sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Oleh karena itu narasumber dari penelitian ini adalah aktor kebijakan yaitu Bupati, Kapolres Klaten, BPBD, Kepala Desa, dan Tim Kampung Siaga. Kemudian tidak lupa sasaran program ini yaitu masyarakat sendiri yang menjadi sampel penelitian adalah Ketua Rukun Warga (RW) yang menjembatani aspirasi dan kondisi masyarakat saat situasi Covid-19 hingga ke setiap Rukun Tetangga (RT) dan juga jembatan kebijakan perangkat desa tersebut sehingga posisi RW disini sangat penting.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan strategi yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data penelitian yang akurat, jelas dan juga spesifik. Bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi (Sugiyono, 2012).

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap gejala, kejadian atau sesuatu permasalahan (Emzir, 2015). Observasi bukanlah hal yang sederhana hanya pengamatan dan hasilnya dijadikan data ilmiah. Mengingat bahwa setiap orang dapat melakukannya dan memiliki pemaknaan berbeda terhadap pembacaan situasi yang dipengaruhi oleh bias-bias kepentingan, minat, serta pengetahuan peneliti.

Maka dari itu dalam buku berjudul “Observasi : Teori dan Aplikasi dalam Psikologi” mengatakan bahwa observasi walaupun memiliki keraguan dalam pengumpulan datanya namun menjadi metode yang tepat jika dilakukan dalam metode kualitatif, oleh karena itu observasi harus menjadi metode asesmen yang memiliki tujuan, terancang dengan sistematis sekaligus terukur bukan hanya sekedar mengamati (Ni'matuzahroh, 2018).

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan observasi non partisipasi dalam pengambilan data. Observasi non partisipasi adalah penelitian yang menempatkan peneliti sebagai pengamat dengan berbekal tujuan dan tolak ukur pembacaan situasi namun tidak turut masuk dalam aktivitas masyarakat ataupun permasalahan yang diteliti yang berbeda dengan observasi partisipatif dengan hal sebaliknya (Widaningsih & Barliana, 2017). Observasi dilakukan di Desa Jomboran untuk mengamati perilaku dan ketaatan masyarakat terhadap protokol pencegahan Covid-19, perilaku pemangku kepentingan seperti perangkat desa dan Tim Kampung Siaga Covid-19 Jomboran. Selain itu peneliti juga akan mengamati sarana dan prasarana yang ada di sana sebagai penunjang kebijakan, jalannya aktivitas kehidupan masyarakat ditengah situasi Covid-19 demi menunjang data-data lain penelitian sehingga terlihat sistem hubungan kausalitas dengan kebijakan Kampung Siaga Covid-19.

b. In-Depth Interview

In-Depth Interview adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (dalam hal ini peneliti) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang akan memberikan jawaban. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dengan melaksanakan teknik wawancara yang cermat maka akan di dapatkan data yang jelas dan spesifik karena mampu menggali seluruh informasi yang kita butuhkan berdasarkan indikator penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau sumber lain yang dapat menunjang penelitian. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti dapat mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono,2012:240). Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa foto, surat-surat, ataupun laporan terkait Covid-19 di Kecamatan Klaten Tengah.

1.9.7. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dimana data disajikan dalam bentuk kata-kata baik bersumber dari hasil wawancara, dokumen dan observasi sehingga hasilnya berupa narasi yang mendalam

(Nugrahani, 2014). Menurut Miles dan Huberman dalam (Ding, 2014) analisis data terdiri dari tiga kegiatan yang dilakukan bersamaan yaitu :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dengan menggali data dari berbagai sumber, dengan wawancara, pengamatan, kemudian ditulis dalam catatan lapangan didukung oleh dokumen, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data peneliti diharuskan memiliki data primer dan data sekunder yang mencukupi. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, memilih dan juga menyederhanakan data mentahan yang didapatkan di lapangan sehingga memudahkan pembacaan atas situasi yang terjadi yang akhirnya memudahkan untuk memverifikasi.

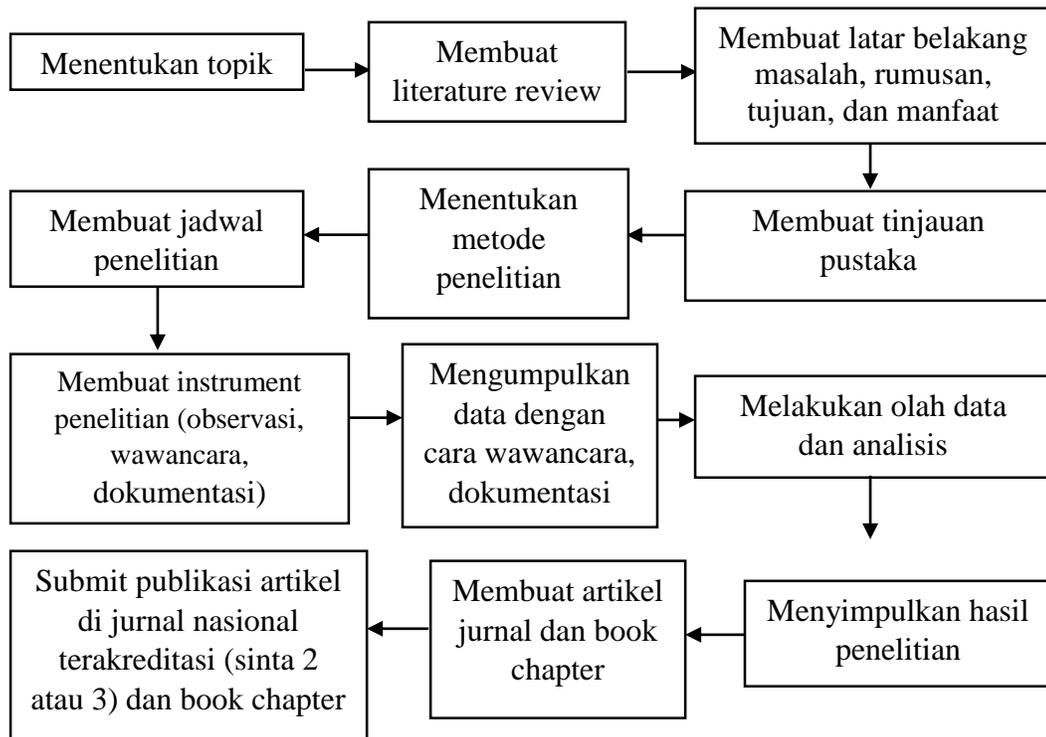
c. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi, telah tersusun dan tervalidasi diperbolehkan untuk pengambilan tindakan. Tindakan yang dimaksud adalah menyajikan data kualitatif primer dan sekunder secara naratif.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data untuk memverifikasi hasil analisis dengan rumusan masalah agar dapat ditarik hubungan kausalitas penelitian hingga dapat memberikan penjelasan “final”. Kesimpulan awal penelitian masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat saat penelitian. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kredibel atau dapat dipercaya sehingga berujung pada kesimpulan efektivitas Kampung Siaga Covid-19 untuk mitigasi bencana tersebut.

Tabel 5
Alur Penelitian



Sumber: Diolah oleh peneliti

Alur dari penelitian yaitu, *pertama* peneliti menentukan topik penelitian sesuai masalah terbaru yang bisa diteliti. *Kedua*, mulai membuat literatur review untuk memperkuat penelitian dengan teori dan cara penelitian yang sudah ada sehingga topik yang akan di bahas menjadi jelas arah tujuannya. *Ketiga*, membuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. *Keempat*, membuat tinjauan pustaka penelitian terdahulu. *Kelima*, kemudian dihubungkan dengan menentukan metode penelitian yang akan digunakan. *Keenam*, lalu membuat jadwal rencana penelitian. *Ketujuh*, dilanjutkan dengan membuat instrument penelitian. *Kedelapan*, mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. *Kesembilan*, selanjutnya melakukan olah data dengan teknik analisis yang ada. *Sepuluh*, menyimpulkan hasil penelitian untuk disajikan. *Sebelas*, hasil dari penelitian membuat artikel jurnal dan book chapter. *Terakhir*, melakukan submit publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi sinta 3 dan book chapter.

1.9.8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2021 terhitung sejak Februari sampai Juli.

Tabel 6

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian (Tahun 2021)																				
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				
		2	9	16	30	3	10	17	24	4	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	
1	Penyusunan Ujian Proposal	■	■	■	■	■																
2	Pengurusan Izin Penelitian						■	■	■	■												
4	Pengumpulan Data Lapangan									■	■	■	■	■								
5	Pengolahan Data														■	■						
6	Penyusunan Laporan Akhir																	■	■	■	■	■

Sumber: Diolah oleh peneliti (2021)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Albi, A., & Johan, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Bevaola Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*.
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cet. 4. Jakarta:Rajawali Pers
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 143.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Ni'matuzahroh, S., & Prasetyaningrum, S. (2018). *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi (Vol. 1)*. Ummpress
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Edisi Keenam, Revisi Kedua. *Jakarta: Elex Media Komputindo*.
- Nurjanah, D., Kuswanda, D., & Siswanto, A. (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, U. (2017). *Asas-Asas Manajemen*. Pt. Refika Aditama
- Sugiyono, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung. Indonesia: Alfabeta.
- Syaodih, N. Sukmadinata. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 Tentang
Kampung Siaga Bencana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

ARTIKEL ONLINE

Awasi Corona. Data Statistik Kasus Covid-19 Kabupaten Klaten 11 Januari 2021.
Diakses 11 Januari 2021 dari [Https://Awasicorona.Klatenkab.Go.Id/Data](https://Awasicorona.Klatenkab.Go.Id/Data)

Farasonalia, Riska (2021) PPKM Mikro Berlaku, Apa Bedanya Dengan PPKM ?.
Diakses 15 Maret 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/060200565/ppkm-mikro-berlaku-apa-bedanya-dengan-ppkm?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Pemerintah%20kembali%20menggunakan,skala%20mikro%20atau%20PPKM%20mikro.>

Gloria (2020) Mini Lockdown Tidak Efektif di Daerah Dengan Tingkat Penyebaran
Covid-19 Tinggi. Website resmi Universitas Gajah Mada. Diakses 15 Maret
2021. <https://www.ugm.ac.id/id/berita/20152-mini-lockdown-tidak-efektif-di-daerah-dengan-tingkat-penyebaran-covid-19-tinggi>

Muhrizal, Victor (2020) Kapolres Klaten Resmikan Kampung Siaga Covid-19 Desa
Jomboran. *Jogja Tribun News*. Diakses 12 Agustus 2020 Dari
[Https://Jogja.Tribunnews.Com/2020/04/13/Kapolres-Klaten-Resmikan-Kampung-Siaga-Covid-19-Desa-Jomboran](https://Jogja.Tribunnews.Com/2020/04/13/Kapolres-Klaten-Resmikan-Kampung-Siaga-Covid-19-Desa-Jomboran)

Priyono, Joko (2020) Kasus Positif Covid-19 Di Klaten Bertambah 2 Orang Satunya Klaster Gowa. Diakses 11 Januari 2021 <https://Klatenkab.Go.Id/Kasus-Positif-Covid-19-Di-Klaten-Bertambah-2-Orang-Satunya-Klaster-Gowa/>

Zuraya, Nidia (2019). Kemensos : Indonesia Miliki 638 Kampung Siaga Bencana. Diakses 28 Januari 2021. Dari <https://nasional.republika.co.id/berita/pxhksr383/kemensos-indonesia-miliki-638-kampung-siaga-bencana>

JURNAL

Aini, N., Ulfah, I. F., & Afala, L. M. (2018). Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana Di Desa Sironoboyo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2017. *Journal of Governance and Policy*, 4(2), 50–61.

Ainun Najib, & Hayatul Khairul Rahmat. (2021). *Analisis Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana nalisis Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Desa Buluh Cina, Siak Hulu, Kampar, Riau*. 5, 14–23.

Akbar, G. S. (2015). *Financing Pattern Of Incumbent Legislative Candidates In The 2019 Simultaneous General Elections*. 1–27.

Amin, M., Novianti, V., Sumberartha, I. W., Priambodo, B., Amin, A. Z., & Prihatnawati, Y. (2020). Pembentukan Satgas Siaga Covid-19 dan Implementasi Tupoksi Satgas Desa Mulyoagung Kabupaten Malang. *Jurnal Graha Pengabdian*, 2(4), 366–377.

Argueso, C. T., Assmann, S. M., Birnbaum, K. D., Chen, S., Dinneney, J. R., Doherty, C. J., Eveland, A. L., Friesner, J., Greenlee, V. R., Law, J. A., Marshall-Colón, A., Mason, G. A., O'Lexy, R., Peck, S. C., Schmitz, R. J., Song, L., Stern, D., Varagona, M. J., Walley, J. W., & Williams, C. M. (2019). Directions for research and training in plant omics: Big Questions and Big Data. *Plant Direct*, 3(4), 1–16. <https://doi.org/10.1002/pld3.133>

- Belanawane S., M. (2015). Kampung Siaga Bencana Sebagai Instrumen Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Di Indonesia: Politik Pembangunan Dan Partisipasi Dalam Diskursus Pembangunan Kebencanaan. *Sosio Konsepsia*, 5(1). <https://doi.org/10.33007/ska.v5i1.160>
- Ding, D. (2014). Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2 (2), 2–3.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6, 100091. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. *Pendidikan*, 143. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Habibullah. (2013). Kebijakan Penanggulangan bencana Berbasis Komunitas : Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 18(02), 133–150.
- Hadi, S. (2020). Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 177–190. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.109>
- Hidayanti, H. (2019). *Efektivitas Desa Siaga Aktif Di Desa Sumber Pinang , Kecamatan Mlandingan , Kabupaten Situbondo. October 2017.*
- Irfan Santosa , Ponoharjo, M. D. H. (2021). *Mewujudkan Masyarakat Siaga Covid-19 di Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Melalui Kegiatan*

KKN. 6(1), 1–11.

Kusumaratih, A., & Satlita, L. (2015). Manajemen Desa Tangguh Bencana Di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Daerah Istimewah Yogyakarta. *Jurnal Adinegara*, 5(1), 1–15.

Mudzakir, M. (2018). Penguatan Forum Siaga Truni Tangguh Penanggulangan Bencana (FSTTPB) Dalam Menghadapi Banjir di Desa Truni Lamongan. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 489(20), 313–335.

Mughran, M. M., Hariani, D., & Djumiarti, T. (2015). *Efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Siaga Bencana Di Kota Semarang*. 1–27.

Mukhsa, Usman, I., Abapihi, B., Sani, A., & Baharuddin. (2020). *Penguatan Desa Siaga COVID 19*. 2(2), 133–138.

Nihawa, A. R. (2020). Penguatan Kelembagaan Pemuda Dalam Mengurangi Penyebaran Pandemi Covid-19 Di Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Skripsi. *Digital Library UIN Sunan Ampel*, 1–118.

Noza, N., Satyagraha, Y., & Handrisal. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Tangguh Bencana Di Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan*. 1–15.

Pevitanda, R., & Hariani, D. (2013). Analisis Pengorganisasian Dalam Penanggulangan Bencana Melalui Kelurahan Siaga Bencana Di Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 53(9), 1689–1699.

Putra, I. W. K. E., & Diatmika, I. P. G. (2019). Rintisan Desa Tangguh Bencana (Destana) Di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 161–166. <https://doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16531>

Razak, M. R. R. (2020). *Konsep perencanaan pembangunan partisipatif di daerah*.

172–193. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xb8c3>

Setyawati, D. N., & Pambudi, A. (2018). Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo, Cangkringan, Sleman, DIY. *Adinegara*, 7, 1100–1110.

Silalahi, U. (2017). Asas-Asas Manajemen. In *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ekonomi*.

Soendari, T. (2012). Metode Penelitian Deskriptif. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1–25.

Sucipto, A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (IBPBD) Kota Bandar Lampung Di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. *Skripsi*, 1–86.

Tamitiadini, D., Dewi, W. W. A., & Adila, I. (2019). Inovasi Model Mitigasi Bencana Non Struktural Berbasis Komunikasi, Informasi, Koordinasi Dan Kerjasama. *Prosiding Comnews 2019*, 1, 204–214.

Widaningsih, L., & Barliana. (2017). *Pendekatan Partisipatif dalam Metode Penelitian Arsitektur* (pp. 1–9).

Zainal, M., Marwan, M., Yanis, M., & Muksin, M. (2020). Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas Melalui Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pidie Jaya Nanggroe Aceh Darussalam. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 237–251. <https://doi.org/10.29062/engagement.v4i1.106>